

Fenomena seperti ini yang dijumpai oleh organisasi partai politik partai demokrasi indonesia perjuangan (PDI-P), partai yang memperoleh suara yang signifikan yang menempatkan posisi juara dalam pemilihan legislatif di tahun ini yaitu tahun 2014. Yang sudah barang tentu partai ini menempatkan mayoritas kadernya di kursi parlemen. Semua ini tidak terlepas dari kerja mesin partai yang sangat optimal selama masa kampanye, terlebih pengaruh kuatnya partai moncong putih ini di dalam mengawal pemerintahan Susilo Bambang Yudharyana selama dua periode yaitu sebagai partai oposisi.

Sangat unik apabila membicarakan kiprah partai trah Soekarno ini, selama sepuluh tahun terakhir dalam dunia perpolitikan negara ini berperan sebagai kontrol pemerintahan, dimana sikap oposisi yang digalakan yang bertugas mengkritisi dan mengawasi kebijakan kebijakan yang dijalankan oleh presiden Susilo Bambang Yudharyana ternyata mendapatkan simpati dari masyarakat tersendiri. Hal ini terbukti dengan keluarnya PDI-P sebagai partai pemenang pemilu.

Selanjutnya pada titik kondisi seperti inilah PDI-P berani mengukung Joko Widodo sebagai calon presiden dan Yusuf Kalla, dan akhirnya calon yang diusung oleh partai yang mengaku peduli terhadap nasib rakyat kecil ini berhasil menang dalam pilpres. Yang terpaut suara 5 % mengungguli lawan politik mereka yaitu Prabowo Subianto dan Moh. Hattarajasa. Dan tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kemenangan jokowi dan Yusuf Kalla tidak bisa terlepas dari peran partai – partai pengukung mereka yang tergabung di dalam koalisi Indonesia Hebat.

Keluarnya Joko Widodo sebagai presiden dan titah sang presiden terpilih adalah kader aktif Partai moncong putih, membawa pergeseran politik dimana dulu partai yang garang

sebagai partai oposisi kini harus beralih haluan partai pemerintahan, partai yang senantiasa mendukung dan menjalankan setiap kebijakan yang di keluarkan oleh sang Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kondisi ini jelas berbeda dengan tugas yang diemban partai ini dalam kurun sepuluh tahun terakhir. Jika dahulu ada kebijakan dari pemerintah yang tidak berafiliasi dan tidak pro pada kepentingan rakyat lalu partai ini dengan lantang dan tegas menolak kebijakan ini, sudah dapat menarik simpati dari masyarakat, lalu bagaimana jika sekarang pada posisi partai pemerintahan, akankah tetap mengedepankan kepentingan masyarakat, atau hanya patuh pada organisasi partai politik bahkan mengabaikan kepentingan Rakyat dengan dalih mendukung kebijakan pemerintah.

Tampaknya PDI-P sudah menyiapkan semua itu, guna tetap mendapatkan kepercayaan di hati masyarakat. Semua ini terlihat dari agenda yang di bahas di dalam Rapat Kerja Nasional(Rakernas) PDI-P yang dilaksanakan pada tanggal 19 – 21 September 2014 yang bertempat di Marina Conventiona Center di kota semarang Jawa Tengah. Diimana di dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) tersebut PDI-P mengajukan dua wacana yang dibahas yang sangat berkaitan dengan masalah besar yang sedang di hadapi bangsa ini ke depan.

Wacana yang pertama di bahas pada tanggal 19 September 2014 yaitu berkaitan dengan polemik pemilihan Kepala Daerah. Dengan jelas PDI-P menolak pemilihan kepala daerah oleh DPRD, maka dari itu fokus wacana yang dibahas yaitu bertema Jangan Rebut Hak Rakyat. Ini merupakan sebuah bentuk anti tesis menentang warisan parlemen di era Yudhayana yang mayoritas Anggota Dewan yang tergabung dalam koalisi Merah Putih menyetujui pemilihan kepala daerah secara tidak langsung oleh rakyat. Terlepas dari itu semua ada juga indikasi bahwa PDI-P ingin menunjukkan kepada rakyat melalui Rapat Kerja

